

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public*. Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem*. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Wien Ika Permanasari, 2010)

Laporan keuangan, sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak *principal* (investor, pemilik dana) untuk melaporkan hasil atau kinerja yang dilakukan sepanjang periode. Dalam hal ini, manajemen bertindak selaku agen atau pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh oleh *principal* untuk mengelola asset atau bisnis perusahaan. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, maka sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan oleh *principal* untuk dikelola manajemen dapat ditelusuri (Hery, 2009).

Pentingnya informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan menyebabkan pihak manajemen melakukan hal-hal yang mengubah laporan keuangan untuk kepentingan pribadinya, seperti mempertahankan jabatan atau mendapatkan bonus yang tinggi. Biasanya laba yang stabil di mana tidak banyak fluktuasi atau *variance* dari satu periode ke periode lain dinilai sebagai prestasi baik. Motivasi untuk memenuhi target laba dapat membuat manajer atau perusahaan mengabaikan praktik bisnis yang baik. Akibatnya, kualitas laba dan pelaporan keuangan menjadi menurun.

Rekayasa laba tidak hanya berkaitan dengan motivasi individu manajer tetapi bisa juga untuk kepentingan perusahaan. Rekayasa laba dilakukan oleh manajer atau penyusun laporan keuangan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Rekayasa laba dapat memberikan gambaran tentang perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usaha pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk merekayasa data keuangan (Sofyan, 2011).

Rekayasa atau manajemen laba telah menjadi suatu permasalahan serius yang dihadapi oleh praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan selama beberapa dekade terakhir ini. Alasan pertama, manajemen laba seolah-olah telah menjadi suatu budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. Sebab aktivitas ini tidak hanya di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertata, namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata, seperti halnya Amerika Serikat. Kedua, sebab dan akibat yang ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi, namun juga tatanan etika dan moral.

Informasi yang seharusnya menjadi sumber utama untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya kehilangan makna dan fungsi karena penyimpangan ini. Laporan keuangan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk menginformasikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan dan dialami perusahaan selama satu periode. Selain itu, muncul keraguan dari publik akan pihak yang menyusun dan memeriksa laporan keuangan, pertanyaan dan keraguan akan layakannya standar akuntansi dan pemeriksaan yang selama ini dipakai secara luas oleh dunia usaha. Apalagi jika mengingat manajemen laba tidak hanya mempengaruhi perekonomian nasional namun juga perekonomian internasional. Secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan publik. Publik menganggap apa yang diinformasikan dunia usaha hanya merupakan akal-akalan pelakunya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain.

Salah satu cara efisien yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan adalah perlunya peraturan dan mekanisme pengendalian, yaitu salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance*. Pengertian dari *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika-etika. *Good Corporate Governance* menjadi salah satu cara untuk mengeliminasi upaya rekayasa manajemen yaitu dengan membuat peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara wajib (*mandated disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*), upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan (Sulistyanto, 2008).

Secara konseptual mekanisme *Good Corporate Governance*, yaitu upaya membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam mengelola sebuah perusahaan dapat menjadi penghambat bagi aktivitas manajemen laba. Maka dari itu, perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan tingkat manajemen labanya. Tetapi ternyata

mekanisme *Good Corporate Governance* belum dapat berjalan dengan baik dan semestinya di Indonesia.

Berman dan Evans (2003) mendefinisikan kata *retail* dalam kaitan *retail management* sebagai “ *those business activities involved in the sale of goods and services to consumers for their personal, family, or household use*” atau keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Sementara itu Davidson (1988) memberikan gambaran tentang bisnis *retail* sebagai; “*business establishment that derives over 50% of its total sales volume to ultimate consumers whose motivate of purchase is for personal or family use*” atau suatu institusi atau kegiatan bisnis yang lebih dari 50% dari total penjualannya merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang motivasi belanjanya adalah untuk kepentingan pribadi atau keluarganya (Asep ST Sujana, 2012).

Perusahaan dagang eceran atau yang sering disebut perusahaan ritel merupakan bagian yang penting bagi roda perekonomian suatu negara, terutama dalam proses distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. *Retailing* dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen yang hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga. Ritel merupakan tahap akhir proses distribusi dengan dilakukannya penjualan langsung pada konsumen akhir. Bisnis ritel didefinisikan sebagai mata rantai terakhir dalam melakukan penjualan barang dan jasa dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Perkembangan ritel atau pasar

eceran yang begitu pesat, berdampak semakin tingginya persaingan memperebutkan pangsa pasar pada dunia usaha saat ini.

Perkembangan dan peluang usaha di bisnis ritel yang sangat besar membuat banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan usaha ritel dan hal ini mengakibatkan pesaing antar ritel yang terjadi di semua tingkat, mulai dari tingkat perusahaan ritel besar bersaing dengan perusahaan ritel besar lainnya, peritel skala menengah bersaing dengan peritel yang sekelas dengannya, hingga pada tingkat mikro antara sebuah warung dan warung lainnya. Bukan hanya itu saja, peritel dari suatu kelas tidak hanya bersaing dengan peritel sesama kelasnya tapi juga dengan peritel dari kelas yang berbeda, misalnya suatu supermarket tidak cuma bersaing terhadap supermarket yang lain, tetapi juga terhadap hypermarket atau minimarket yang kebetulan lokasinya tidak berjauhan. Tujuan dari bisnis ritel itu sendiri adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang baik sehingga dapat menjamin kelangsungan bisnis ritel tersebut (Asep ST Sujana, 2012).

Manajemen berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan dan keberhasilan tersebut tercermin pada laporan keuangan. Indikasi adanya manajemen laba pada laba perusahaan ritel yang tercermin di laporan keuangan dapat terjadi dengan pencatatan harga pokok penjualan yang tidak sesuai yang diakibatkan oleh penilaian akhir persediaan yang terlalu tinggi. Harga pokok penjualan yang tidak sesuai akan menyebabkan laba yang tercatat dalam laporan keuangan menjadi lebih tinggi dari yang sebenarnya terjadi.

Meskipun penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan keharusan sejak pertama kali perusahaan didirikan, kesadaran akan keharusan atau kebutuhan ini baru tumbuh secara dramatis pada beberapa tahun terakhir. Reformasi GCG mendapatkan momentum yang luar biasa di awal dasawarsa ini yakni ketika skandal beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan di beberapa Negara Eropa menimbulkan kerugian dan kerusakan yang membahayakan (Antonius Alijoyo, Ali Darwin, Eddie M Gunadi dan Ray Indonesia, 2006).

Beberapa kasus kegagalan *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat kita lihat dari kasus yang terjadi di Bursa Efek Indonesia misalnya PT. Kimia Farma Tbk, PT Ades Alfindo, dan PT. Indofarma mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi laba. PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2002 mengindikasikan adanya praktik manajemen laba dengan menaikkan laba. Indikasi adanya penggelembungan keuntungan (*overstated*) dalam laporan keuangan pada semester I 2002 juga dinyatakan dalam *annual report* Bapepam 2002. Berdasarkan siaran pers Bapepam atas kasus PT. Kimia Farma pada 27 Desember 2002, kasus ini bermula dari ditemukannya kesalahan (oleh partner dari KAP HTM) dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan Kementerian BUMN melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (*overstated*) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bapepam, ternyata laba bersih yang disajikan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 *overstated* sebesar Rp32,7 miliar, di mana 2,3% berasal dari penjualan dan

sebesar 24,7% dari laba bersih milik PT Kimia Farma. Kesalahan-kesalahan tersebut berasal dari kesalahan (1) *overstate* penjualan pada unit industri bahan baku sebesar Rp2,7 miliar; (2) kesalahan sentral; dan (3) *overstated* sebesar Rp8,1 miliar pada persediaan barang dagangan dan *overstated* pada penjualan sebesar Rp10,7 miliar yang keduanya terjadi pada unit Pedagang Besar Farmasi (Siaran pers Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 27 Desember 2002).

Pada tahun 2004 terungkap kasus rekayasa atau manajemen laba pada PT. Ades Alfindo. Manajemen Ades baru melaporkan angka penjualan riil pada 2001 diperkirakan lebih rendah Rp13miliar dari yang dilaporkan. Pada 2002, perbedaannya mencapai Rp45miliar, sedangkan untuk 2003 sebesar Rp55miliar. Untuk enam bulan pertama 2004, kira-kira hampir Rp2miliar. Kesalahan tersebut luput dari pengamatan publik karena PT Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan PT Ades 2001 dan 2004 lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan (*overstated*). Selanjutnya ditemukan kasus kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan yang berawal dari temuan Bapepam mengenai adanya pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Indofarma. Dalam *press release* yang dikeluarkan oleh Bapepam pada 8 November 2004 terungkap bahwa nilai yang disajikan dalam laporan keuangan PT Indofarma pada 2001 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dilaporkan. Penyajian nilai lebih tersebut terdeteksi dari *overstated* penyajian nilai barang dalam proses yang tercantum dalam laporan keuangan 2001 yang mencapai Rp28 miliar. Akibat kelebihan penyajian tersebut, nilai harga pokok produksi menjadi

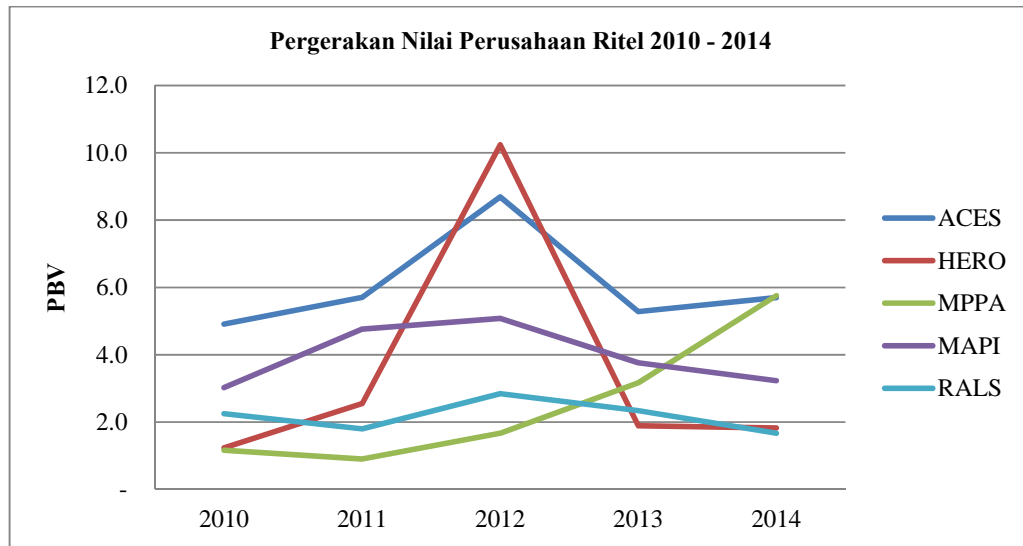
lebih rendah dari nilai yang seharusnya dilaporkan (*understated*). Karena harga pokok produksi rendah, maka berakibat pada penyajian laba yang lebih tinggi dari seharusnya untuk jumlah yang sama. Mengacu pada kerangka dasar penyajian laporan keuangan, penyajian laba yang lebih tinggi berdampak pada penyajian informasi yang menyesatkan dan tidak andal sehingga merugikan pengambil keputusan (Dedhy Sulistiawan, Yeni, Januarsi dan Liza Alvia, 2011).

Salah satu skandal yang terjadi baru-baru ini, Tesco yang merupakan salah satu supermarket terbesar di UK terlibat skandal akuntansi dimana selama 6 bulan laba yang dilaporkan *overstated* £250 juta. Dampak dari persaingan antar supermarket di UK yang semakin sengit memaksa supermarket kedua terbesar di UK ini melakukan skandal akuntansi (Wulandari dan Lastanti, 2015).

Selanjutnya pada tahun 2015, dunia usaha kembali digemparkan dengan kasus manajemen laba yang terjadi di Jepang. Kasus ini bermula atas inisiatif Pemerintahan Perdana Menteri Abe yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran pemerintah tersebut, Toshiba menyewa panel independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di Perusahaannya. Betapa mengejutkannya bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008. Panel yang dipimpin oleh mantan jaksa terkenal di Jepang itu, mengatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit *personal computer* sampai

ke unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Manajemen biasanya mengeluarkan tantangan target yang besar itu sebelum akhir kuartal/tahun fiskal. Hal ini mendorong kepala unit bisnis untuk melakukan rekayasa pada catatan akuntansinya.

Laporan itu juga mengatakan bahwa penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus-menerus dilakukan sebagai kebijakan resmi dari manajemen, dan tidak mungkin bagi siapa pun untuk melawannya, sesuai dengan budaya perusahaan Toshiba. Akibat laporan ini CEO Toshiba, Hisao Tanaka, mengundurkan diri, disusul keesokan harinya pengunduran diri wakil CEO Toshiba, Norio Sasaki. Selain itu Atsutoshi Nishida, *chief executive* dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang sekarang menjadi penasihat Toshiba juga mengundurkan diri. Panel tersebut mengatakan bahwa Tanaka dan Sasaki tidak mungkin tidak tahu atas praktik perekayasa laporan keuangan ini. Perekayasa ini pasti dilakukan secara sistematis dan disengaja. Saham Toshiba turun sekitar 20% sejak awal April ketika isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar ¥1,67 triliun (setara dengan Rp. 174 triliun). Badan Pengawas Pasar Modal Jepang kemungkinan akan memberikan hukuman pada Toshiba atas penyimpangan akuntansi tersebut dalam waktu dekat ini (Simbolon, 2015).



Grafik 1.1 Pergerakan Nilai Perusahaan Ritel 2010 – 2014

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai perusahaan ritel periode 2010-2014 bergerak fluktuatif. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan dan penurunan harga saham rata-rata. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, karena investor percaya pada kinerja perusahaan dalam mengelola perusahaan serta prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Sebaliknya nilai perusahaan yang rendah akan membuat investor tidak tertarik untuk membeli saham, karena resiko yang akan ditimbulkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi investor dalam menilai perusahaan adalah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan

Tabel 1.1 Hasil Perhitungan Indeks Eckel Perusahaan Ritel 2010 – 2014

Tabel Hasil Perhitungan Indeks Eckel (Δ EA/ Δ Sales)					
Kode Perusahaan	2010	2011	2012	2013	2014
ACES	0,04684	0,14241	0,18360	0,11032	0,07103
HERO	0,04941	0,03969	0,01870	0,26506	(0,37711)
MPPA	(3,18188)	(15,66364)	0,06082	0,19666	0,06504
MAPI	0,06177	0,13535	0,04266	(0,04884)	(0,12191)
RALS	0,04301	0,07343	0,07520	(0,11024)	0,25425

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan hasil perhitungan indeks Eckel rata-rata keseluruhan perusahaan ritel Indonesia pada tahun 2010 – 2014 di bawah angka 1 atau menunjukkan adanya praktik perataan laba pada perusahaan. Ketatnya persaingan antar perusahaan ritel menyebabkan adanya indikasi rekayasa dengan mengubah informasi pada laporan keuangan untuk menarik minat investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut.

Beberapa kesenjangan atau perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu (*research gap*) dapat dilihat pada penelitian tentang kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian Tarjo (2008) menunjukkan hubungan positif signifikan kontradiksi dengan penelitian Wulandari (2005) menunjukkan hubungan positif tidak signifikan. Penelitian selanjutnya tentang kepemilikan manajemen terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan hubungan positif signifikan kontradiksi dengan penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menunjukkan hubungan negatif signifikan. Penelitian variabel yang ketiga yaitu tentang dewan

komisaris independen terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian Lastanti (2004) menunjukkan hubungan positif signifikan kontradiksi dengan penelitian Rachmawati dan Hanung (2007) menunjukkan hubungan tidak signifikan. Penelitian variabel yang keempat yaitu tentang komite audit terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menunjukkan hubungan positif signifikan kontradiksi dengan penelitian Rachmawati dan Hanung (2007) menunjukkan hubungan tidak signifikan. Penelitian variabel yang kelima yaitu tentang ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian Isshaq, et al (2009) menunjukkan hubungan positif signifikan kontradiksi dengan penelitian Wulandari (2005) menunjukkan hubungan positif tidak signifikan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesimpulan yang tidak konsisten mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Sebagian penelitian menarik kesimpulan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif pada nilai perusahaan, tetapi dalam penelitian yang lain menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif pada nilai perusahaan, dan ada peneliti yang menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini terlihat pada penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006), Ferdawati (2009) dan Putri (2011) yang menemukan bukti bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Rachmawati dan Triatmoko (2007) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan Herawaty (2008)

menemukan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya terdapat beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya di antaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujijantho dan Pramuka (2007), Bangun dan Vincent (2008) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba. Namun, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2010) dan Subhan (2011) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Azlina (2010) dan Subhan (2011) menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan pada manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Iqbal dan Fachriyah (2008), Midiastuty dan Mahfoedz pada (2003) dan Pradipta (2011) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin tinggi manajemen laba (Wulandari, 2013).

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (Tika Amalia, 2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit memiliki pengaruh terhadap adanya tindakan manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme audit yang diproksikan oleh dewan komisaris dan komite audit telah efektif dalam mengurangi tindakan manajemen laba. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Mahalia (2013) dalam Tika

Amalia (2013) ditemukan bahwa perusahaan di BEJ, ditemukan secara menyeluruh (100%) perusahaan melakukan manajemen laba, dengan cara menurunkan nilai laba yang dilaporkan pada laporan keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan-perubahan metode dan modifikasi laporan keuangan yang dilakukan untuk mendapatkan jumlah laba yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Nurlela dan Islahuddin (2008) dan Ni Wayan Rustiarini (2010) menunjukkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Penelitian ini dimotivasi oleh banyaknya kesimpulan yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan, pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap praktik manajemen laba serta pengaruh praktik manajemen laba terhadap nilai perusahaan, dimana untuk mekanisme *Corporate Governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi independen, dewan komisaris independen dan komite audit masih disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba mencerminkan tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian tersebut.

Selain itu, informasi pada laporan keuangan mengandung informasi akuntansi yang penting kaitannya dengan nilai perusahaan dan proses pengambilan keputusan bagi penggunaannya, sehingga praktik manajemen laba menjadi suatu isu yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan motivasi tersebut,

maka penelitian ini diberi judul **"PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PERDAGANGAN JASA & INVESTASI SUB SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2010 - 2014"**

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhatian utama pemakai laporan keuangan lebih terpusat pada informasi laporan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan tanpa memperhatikan metode-metode yang dipergunakan untuk mencapai laba yang dilaporkan.
2. Terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan) dengan *agent* (manajemen).
3. *Agent* sebagai manajemen mempunyai informasi lebih mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Sehingga muncullah asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan.
4. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang diharapkan dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba ternyata tidak bekerja secara efektif.
5. Banyaknya skandal kecurangan terhadap pelaporan keuangan dan manajemen laba pada perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang serta indentifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini agar tujuan dari pembahasan ini dapat dimengerti dengan baik dan tepat. Dan pembatasan masalah penelitian ini adalah :

- a. Perusahaan – perusahaan industri perdagangan jasa & investasi sub sektor perdagangan eceran (ritel) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- b. Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur menggunakan mekanisme TARIF yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Independen, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen
- c. Penelitian ini menggunakan praktik Manajemen Laba sebagai variabel intervening untuk menguji Nilai Perusahaan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Independen, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik Manajemen Laba ?

2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan praktik Manajemen Laba ?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik Manajemen Laba ?
4. Apakah Dewan Direksi Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik Manajemen Laba ?
5. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik Manajemen Laba ?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik Manajemen Laba ?
7. Apakah Manajemen Laba berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Nilai Perusahaan ?
8. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Independen, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan ?
9. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan ?
10. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan ?
11. Apakah Dewan Direksi Independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan ?
12. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan ?

13. Apakah Komite Audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis :

1. Pengaruh negatif signifikan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Independen, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan terhadap praktik Manajemen Laba
2. Pengaruh negatif signifikan Kepemilikan Manajerial terhadap praktik Manajemen Laba
3. Pengaruh negatif Kepemilikan Institusional terhadap praktik Manajemen Laba
4. Pengaruh negatif signifikan Dewan Direksi Independen terhadap praktik Manajemen Laba
5. Pengaruh negatif signifikan Dewan Komisaris Independen terhadap praktik Manajemen Laba
6. Pengaruh negatif signifikan Komite Audit terhadap praktik Manajemen Laba
7. Pengaruh negatif signifikan praktik Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan
8. Pengaruh positif signifikan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Independen, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan terhadap Nilai Perusahaan

9. Pengaruh positif signifikan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan
10. Pengaruh positif signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
11. Pengaruh positif signifikan Dewan Direksi Independen terhadap Nilai Perusahaan
12. Pengaruh positif signifikan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan
13. Pengaruh positif signifikan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi para pengguna informasi (pemegang saham, manajer, kreditur, karyawan) untuk memahami mekanisme *corporate governance* dalam memberikan suatu keputusan yang tepat dan bijaksana
2. Bagi bidang akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori